PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Dennyca Hendriyanto Nugroho¹, Febra Robiyanto²

^{1,2}Universitas Muria Kudus

Email : dennyca.hendriyanto@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 10 orang per-desa, sehingga total responden sebanyak 100 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency, accountability, community participation, and competence of village officials on village fund management in villages in Bae District, Kudus Regency. This type of research is quantitative research using descriptive methods. The sampling technique uses purposive sampling with the number of respondents as many as 10 people per village, so that the total respondents are 100 people. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS program version 25. Based on the results of the research conducted, it shows that transparency, accountability, community participation, and competence of village officials simultaneously have a significant effect on village fund management. Meanwhile, partially, transparency does not have a significant effect on village fund management. Accountability has a significant positive effect on village fund management. Community participation has a significant positive effect on village fund management, and the competence of village officials has a significant positive effect on village fund management.

Keywords: *Village fund management, transparency, accountability, community participation, competence of village officials.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran. Sehingga, disahkanlah Undang-Undang yang mengatur tentang Desa yaitu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adanya UU Desa ini diharapkan menjadi tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik (Mukmin & Maemunah, 2018).

Dalam melaksanakan wewenangnya dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Selama empat tahun terakhir pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar ke seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yaitu sebesar Rp60 triliun dan realisasi dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp59,86 triliun atau 98,77%. Selanjutnya pada tahun 2019 anggaran dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp70 triliun dan realisasi dana yang dikucurkan sebesar Rp42,2 triliun atau 60,29%. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan kembali menjadi Rp72 triliun (<http://bpkp.go.id>). Pada tahun 2021 menurut Menteri Desa, alokasi anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun dan dana yang telah dicairkan sebesar Rp11,361 triliun (<https://setkab.go.id>). Dengan besarnya dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, sehingga mencapai pembangunan desa yang maju.

Dana tersebut bertujuan untuk menjadi sumber pembiayaan program pemerintah demi mensejahterakan rakyat. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat merealisasikan dana desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik yang dapat menunjang tujuan utama pemerintah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana desa tidak sepenuhnya dijadikan untuk pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan

prinsip-prinsip manajemen publik yang baik (Putra & Rasmini, 2019). Hal ini Sesuai dengan Permendagri No. 113 (2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, diperlukan aparat desa yang andal dan berkompenten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018: 32). Adanya transparansi memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada publik untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan khalayak umum. Transparansi dana desa yakni keterbukaan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga, akan mewujudkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Serta, dengan adanya asas transparan ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan (Windyastuti et al., 2019).

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil dari variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Nazar et al., 2021; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019). Namun, terdapat pula research gap dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil dari variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Yanto & Aqfir, 2020).

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atas seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan secara berkala, yang mana informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020;

Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019). Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa dalam setiap proses pengelolaan dana desa, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus didasari oleh mekanisme pembangunan partisipatif yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Masruhin & Kaukab, 2019; Mukmin & Maemunah, 2018). Namun, terdapat pula dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Nazar et al., 2021; Yanto & Aqfir, 2020).

Menurut Mahayani (2017) menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa, yaitu kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan dari kepala desa. Dalam penerapan asas-asas pengelolaan dana desa yang kredibel, maka dibutuhkan pula aparat desa yang berkompenten, unsur pengawasan dan pelaksanaan audit yang profesional (Putri, 2015). Salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu terbatasnya kemampuan aparatur desa dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa (Mahayani, 2017). Maka dari itu, aparat desa harus didukung oleh latar belakang yang memadai, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidangnya (Ferina et al., 2016). Aparatur desa yang berkompenten sangat dibutuhkan karena sebagai salah satu agen penggerak pemerintahan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan pemerintahan itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa

kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Sedangkan dalam penelitian (Nazar et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa. Terdapat pula *research gap* yang ditunjukkan oleh penelitian (Sweetenia et al., 2019) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat *research gap* pada penelitian sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Bae. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN TEORITIK

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok ini yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *Stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaikbaiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan.

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust = amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward = manajemen*) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, memberikan kemudahan akses informasi, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan (Mukmin & Maemunah, 2018). Berdasarkan *stewardship theory* menerangkan bahwa *steward* merupakan individu yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya, maka hal tersebut dapat diwujudkan melalui prinsip transparansi. Dimana aparat desa memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan desa, terutama pengelolaan dana desa. Hal ini diwujudkan agar menghindari adanya asimetri informasi yang dapat memberikan keraguan publik terhadap pemerintah. *Steward* akan selalu berusaha untuk menerapkan asas transparansi yang tinggi agar dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi pengawasan untuk menghindari penyimpangan pengelolaan dana desa dan terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu, dapat dirumuskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Nazar et al., 2021; Windyastuti et al., 2019).

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas yaitu memberikan informasi atas kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Yanto & Aqfir, 2020). Berdasarkan *stewardship theory*, steward memiliki tanggungjawab untuk melaporkan hasil kinerja atas program yang dilaksanakan kepada publik. Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggungjawab dari steward (aparatur desa) atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada eksekutif di atasnya maupun kepada principal (masyarakat desa). Oleh karena itu, apabila masyarakat menilai penerapan asas akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, maka pengelolaan dana desa-nya juga dianggap baik dan optimal. Maka dapat dirumuskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019).

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sebagai aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat (Matia Andriani, 2019). Dalam perspektif *stewardship theory* menyatakan bahwa masyarakat sebagai principal merupakan tujuan utama adanya penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, untuk mewujudkan prioritas tujuan pemerintah secara optimal dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat memberikan masukan, penilaian dan pengawasan pada kinerja aparat desa (steward). Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan sasaran tujuan penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai principal berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Masruhin & Kaukab, 2019; Matia andriani, 2019; Mukmin & Maemunah, 2018).

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan teori Stewardship dalam konteks pengelolaan dana desa, dijelaskan bahwa aparat sebagai eksekutif yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan memiliki motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan utama pemerintah, yakni kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aparat selaku pengelola kebijakan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaannya kepada prinsipal. Sehingga, pemerintah membutuhkan dan berusaha secara maksimal untuk membentuk aparatur yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi agar memberikan hasil yang memuaskan (Mada et al., 2017). Semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini dikarenakan aparatur yang berkompeten akan mampu melaksanakan tugasnya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur akan menuntun aparatur untuk bekerja dengan efektif, efisien, dan produktif. Aparatur yang berkompeten akan menyelesaikan kerjanya dengan maksimal, sehingga akan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Hal ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Nazar et al., 2021).

H4 : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian yang dipilih penulis adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan menggunakan variabel independen yakni Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Kompetensi Aparat Desa (X4), dan variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yakni data

primer. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu survey dengan cara membagikan kuisisioner sebagai instrumen pengambilan data. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan metode ini dipilih karena akan mendapatkan hasil pilihan-pilihan tertentu dan akan diperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Suharyadi & Purwanto, 2016: 19). Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu aparatur desa, pejabat tim pengelola dana desa, dan perwakilan masyarakat. Sehingga, dalam penelitian ini sampel yang dipilih sebanyak 10 (tujuh) responden di setiap desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tiga orang kasi, dan empat orang perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan dana desa. Sehingga total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam uji analisis data adalah model analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi hipotesis pengujian yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Hipotesis Nol (H_0) : Data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (H_a) : Data tidak terdistribusi secara normal

Tabel 1. Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000
	Std. Deviation	1,3525529
	Absolute	0,075
Most Extreme Differences	Positive	0,061
	Negative	-0,075
Kolmogorov-Smirnov Z		0,598

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,767
------------------------	-------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Berdasarkan tabel 1 pada uji normalitas data bahwa besarnya nilai signifikansi (*Asymp Sig. 2- tailed*) adalah sebesar 0,767 atau 76,7%, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal karena signifikannya berada di atas 0,05 atau 5% sehingga hipotesisnya menerima Hipotesis Nol (H_0) data terdistribusi secara normal dan menolak Hipotesis Alternatif (H_a) data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Metode pengujian yang bisa digunakan yaitu melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi, membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 (Gozali, 2011). Adapun hasil dari uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Transparansi (X1)	0,816	1,154
Akuntabilitas (X2)	0,826	1,142
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,812	1,123
Kompetensi Aparatur Desa (X4)	0,878	1,033

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengandung gejala multikolinieritas dan *tolerance* menunjukkan

> dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel dalam model regresi tersebut.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi pelanggaran terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\text{Ln}e^2$) dengan variabel independen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak ada gejala eteroskedastisitas

H_a : ada gejala heteroskedastisitas

H_0 diterima bila Signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan H_0 ditolak bila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil perhitungan Heterokedastisitas dengan uji *park* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,638	4,467		0,143	0,887
1 Transparansi (X1)	-0,087	0,103	-0,171	-0,849	0,403
Transp. Pengel. Keu (X2)	-0,010	0,157	-0,013	-0,065	0,948
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,106	0,148	0,138	0,716	0,480
Komp. Aparat Desa (X4)	0,106	0,128	0,118	0,316	0,480

a. Dependent Variable: LNRes1

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) semua variabel bersifat homoskedastisitas yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji *park*. Semua nilai probabilitas (sig) adalah lebih besar dari 0.05 dengan demikian bahwa dalam model tersebut H_0 diterima H_a ditolak sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Keباikan Model (Goodness of Fit Model)

Uji *goodness of fit* merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoritis). Adapun indikator dari goodness of fit dapat dilihat dari koefisien determinasinya (Adjusted R-Square)

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, digunakan uji Koefisien Determinasi (KD). Berikut merupakan hasil perhitungan R^2 untuk mengetahui besarnya pengaruh Maksimalisasi kekayaan, Informasi Akuntansi, hubungan audit internal dengan eksternal, Informasi netral, independensi audit internal terhadap pembuatan keputusan investor individu dengan menggunakan program aplikasi SPSS 21.0.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model

Summary^b

Mode I	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,785 ^a	0,616	0,609	2,05199

a. Predictors: (Constant), Komp. Aparat Desa (X₄), Partisipasi Masyarakat (X₃), Transp. Pengel. Keu (X₂), Transparansi (X₁)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,616 variabel Transparansi (X₁), Akuntabilitas (X₂), Partisipasi Masyarakat (X₃), Kompetensi Aparat Desa (X₄) bersama-sama menjelaskan variabilitas dari Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah sebesar 61,6% sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui seberapa jauh Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa secara simultan mempengaruhi terhadap Pengelolaan Dana Desa maka dilakukan uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Uji F / Analisis Model

ANOVA^a

Mode I	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28,540	4	9,513	3,047	0,035 ^b
1 Residual	187,319	96	3,122		
Total	215,859	100			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Transp. Pengel. Keu (X2), Transparansi (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung sebesar 3,047 dan nilai Ftabel pada tarif $\alpha = 5\%$ dan derajat pembilang $m = 4$ dan derajat penyebut digunakan $n-m-1 = 100-3-1 = 96$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,758 atau $3,047 > 2,758$ diterima, artinya Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa secara simultan mempengaruhi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Selain itu nilai probability sebesar 0,035 yang berarti angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,03 < 0,05$ menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Transparansi adalah positif sebesar 1,047 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 100-3 = 97$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,047 < 2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,065 > 0,05$), maka H_a ditolak artinya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 1 ditolak).

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Akuntabilitas adalah positif sebesar 3,514 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 100 - 3 = 97$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,514 > 2,000) dan $sig < 0,05$ (0,001 > 0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 2 diterima).

Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3 Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah positif sebesar 3,190 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 100 - 3 = 97$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,190 < 2,000) dan $sig < 0,05$ (0,004 > 0,05), maka H_a diterima artinya bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 3 diterima).

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4 Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah positif sebesar 4,190 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 100 - 3 = 97$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,190 < 2,000) dan $sig < 0,05$ (0,004 > 0,05), maka H_a diterima artinya bahwa Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 3 diterima).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Bae. Hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah kepada publik. Masyarakat tidak mengetahui program maupun kegiatan pemerintahan serta penggunaan dananya, karena tidak adanya media informasi, seperti papan informasi dan pengumuman

yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dapat meningkatkan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak mengetahui informasi kegiatan pemerintahan. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa juga cukup optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas yang baik artinya pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desanya, baik kepada peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah pusat, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, R. S., Rahayu, S., & Ak, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) *The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management* (A. EProceeding of Management, 7(1), 1008–1014.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Bumdes. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Ball, C. (2009). What Is Transparency? *Public Integrity*, 11(4), 293–308. <https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922110400>
- Budiaji, W. (2013). Skala pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 2(2), 127–133.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ferina, I., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Ghozali. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hardiyansyah. (2012). *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Gaya Media: Yogyakarta.
- Humas. (2021). Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa. <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desa-sudah-terima-dana-desa/>, (Diakses pada 22 Oktober 2021).
- KEMENDESA. (2020). Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dam Transmigrasi Republik Indonesia, 53(9), 1689–1699.

- Kumalasari, M., Subowo, & Anisykurillah, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Manajemen Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 18–25. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i1.3896>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018b). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Terbaru)*. ANDI: Yogyakarta.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2018). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 1(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Nazar, S. N., Wulandari, R., Syafrizal, S., & Lestari, A. (2021). Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of Villages Fund Management. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70>
- Oktavianus Pasoloran. (2001). *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntansi Organisasi Sektor Publik* (pp. 419–432).
- Permendagri No. 113. (2014). *Permendagri No 113 Tahun 2014*. Republik Indonesia, 51(1), 51.
- Purwanto, S. dan. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (3rd ed.)*. Salemba Empat.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>

- Putri, E. M. N. (2015). Faculty of Economic, Riau University,. JOM Fekon, 2(2).
- Sari, I. R., Nasution, I. A., Akuntansi, S., & Prima, U. (2021). Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Publik terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. 2(2), 241–253.
- Saskara, I. P. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas pada Pengungkapan Manajemen Risiko. E-Jurnal Akuntansi, 24(3), 1990–2022. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p13>
- Sukarno. (2020). Akuntabilitas Dana Desa. <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, (Diakses pada 22 Oktober 2021).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52–66.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Webler, T., Tuler, S., & Krueger, R. (2001). What is a good public participation process? Five perspectives from the public. Environmental Management, 27(3), 435–450. <https://doi.org/10.1007/s002670010160>
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. Proceeding UII-ICABE, 177–184.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Economy Deposit Journal (E-DJ), 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>